

**PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN BAHAN
PERUMUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh :

WAHYU RAMADHAN

NPM 1703090009

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **WAHYU RAMADHAN**
NPM : 1703090009
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari,tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **H. MUJAHIDDIN, S.sos, MSP**

(.....)

PENGUJI II : **SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.**

(.....)

PENGUJI III : **Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI M.I.KOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama Mahasiswa : WAHYU RAMADHAN
NPM : 1703090009
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN BAHAN
PERUMUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG

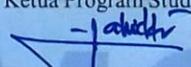
Medan, 19 Oktober 2021

Dosen Pembimbing


Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.

Disetujui Oleh:

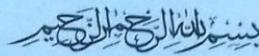
Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN, S.Sos. MSP

Dekan,


Dr. ARIEF SALEH, S.Sos. MSP

PERNYATAAN



Dengan ini saya, Wahyu Ramadhan, NPM 1703090009, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang- undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai – nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 17 Oktober 2021



Yang menyatakan,

WAHYU RAMADHAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk kita para umatnya, semoga dengan memperbanyak shalawat kepada beliau kita termasuk kedalam golongan umat yang mendapat safaat-Nya di kemudian hari kelak.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata-1 di Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini berjudul **“PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN BAHAN PERUMUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG”**.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan. Amiin.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak terutama kepada kedua orang tua peneliti yaitu ayah **Ferizal Chaniago** dan ibunda **Yunita** yang telah memberikan segala hal yang peneliti butuhkan berupa perhatian, kasih sayang, pengorbanan serta doa

yang tulus terhadap peneliti sehingga menimbulkan motivasi pada diri peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos.,M.SP selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mohd. Yusri., M.Si. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang selalu membimbing, mendidik, mendukung dan memberi saran serta masukan didalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam pemberkasan.

9. Terima Kasih kepada BAPPEDA Aceh Tamiang beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.
10. Terima Kasih kepada Ibu Irma selaku Pendamping sekaligus Koordinator telah membantu peneliti dalam memperoleh data.
11. Terima Kasih kepada Rekan-rekan Stambuk 2017 Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan semangat, saran dan motivasi kepada peneliti.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 02 Oktober 2021

WAHYU RAMADHAN
NPM. 1703090009

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peranan Bappeda Aceh Tamiang dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial daerah diawali dengan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan factor penghambat meliputi penyesuaian/kesiapan kebijakan, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II :URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian peranan.....	7
2.2 Pengertian kebijakan.....	9
2.2.1 Kebijakan sosial.....	9
2.2.2 Aspek aspek kebijakan sosial.....	10
2.2.3 Tujuan kebijakan sosial.....	10
2.3 Pengertian perencanaan.....	11
2.3.1 Karakteristik perencanaan.....	12
2.3.2 Fungsi perencanaan.....	13
2.3.3 Tujuan perencanaan.....	14
2.3.4 Jenis jenis perencanaan.....	15
2.4 Kesejahteraan sosial.....	16
2.4.1 Tujuankesejahteraan sosial.....	17

2.4.2 Fungsi fungsi kesejahteraan sosial.....	17
2.5 Pengertian perencanaan sumber dayamanusia.....	18
2.6 Pengertian kemiskinan.....	20
2.7 Pengertian kesenjangan sosial.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian.....	28
3.2 Kerangka konsep.....	29
3.3 Defenisi konsep.....	30
3.4 Kategorisasi.....	32
3.5 Narasumber.....	32
3.6 Teknik pengumpulan data.....	33
3.7 Teknik analisis data.....	34
3.8 Lokasi dan waktu penelitian.....	36
3.9 Deskripsi ringkas objek penelitian.....	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil penelitian.....	51
4.2 Pembahasan	59
BAB V : PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan yang kurang matang menjadi salah satu permasalahan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama pada bidang kesejahteraan sosial. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju dan tidak abu-abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan.

Bappeda salah satu lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan segala aktivitasnya. pemerintah harus memaksimalkan sumber daya aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan bidang urusannya masing-masing dalam penyelenggaraan program pembangunan, Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan maksimal, tentu saja harus melalui proses perencanaan yang baik. Oleh karena itu, organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang urusan perencanaan pembangunan harus memiliki sumber daya aparatur perencana yang memadai terutama pada bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Bappeda masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Oleh karena itu disinilah permasalahan yang harus dihadapi bappeda dalam kurangnya sumber daya manusia untk meningkatkan kesejahteraan sosial di Aceh Tamiang.

Penyelenggaraan kinerja BAPPEDA Aceh Tamiang tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Kurangnya APBD ibarat kertas kosong dan sebaliknya penganggaran tanpa perencanaan akan cenderung menghasilkan kegagalan dalam pembangunan, Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan di Aceh Tamiang makin efektif dan efisien karna setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan pembangunan di Aceh Tamiang masih belum terintegrasi yaitu perencanaan dan penanggaran yang

tidak segaris, tidak sinkron, dan antara yang direncanakan berbeda dengan yang dianggarkan sehingga tujuan pembangunan meleset dari sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Perencanaan pembangunan harus benar-benar terintegrasi, terkonsolidasi, tidak egosektoral, serta terorganisasi antarsektor, antarwilayah, antarpusat dan daerah. Tuntutan yang harus dipenuhi BAPPEDA Aceh Tamiang yaitu selalu memperhatikan value for money.

Upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja BAPPEDA dalam sektor kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan tolak ukur paling dasar untuk mengukur kualitas kehidupan seseorang. Warga yang masih di dera kemiskinan niscaya mengalami banyak kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidupnya. Begitu pula persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum kunjung berakhir bagi BAPPEDA Aceh Tamiang.

Selain dalam mengentaskan kemiskinan BAPPEDA juga berperan melaksanakan program Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) yang merupakan faktor terjadinya kemiskinan. Dimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan adanya keterkaitan. Tujuan terpenting dari pembangunan adalah pengurangan kemiskinan, yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan atau dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi, terdapat hubungan

segitiga antara pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan. BAPPEDA Aceh Tamiang telah melakukan berbagai upaya di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun upaya tersebut belum menampakkan hasil yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan

Berdasarkan dari uraian di atas dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang penyusunan kebijakan BAPPEDA, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait *"peranan Bappeda Aceh Tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang"*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah peneliti adalah bagaimana peranan BAPPEDA Aceh Tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian sangat penting dirumuskan sebelum suatu kegiatan mulai dilaksanakan Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Bappeda Aceh Tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian

Prinsipnya penelitian ini diharapkan dapat berhasil mencapai tujuan penelitian secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat.

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya mengenai peranan BAPPEDA Aceh Tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Kegunaan Praktis

a. Adapun manfaatnya bagi institusi adalah:

Sebagai masukan atau informasi untuk memperoleh gambaran yang lebih konkrit mengenai peranan Bappeda Aceh Tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Adapun manfaatnya bagi pembaca adalah:

Diharapkan bagi pembaca sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam memperkaya wawasan tentang peranan Bappeda Aceh Tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang.

c. Adapun manfaatnya bagi peneliti adalah:

Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam menambah wawasan mengenai peranan Bappeda Aceh Tamiang dalam penyusunan

kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya: jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penyajian data dan analisis data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian peranan

Soerjono Soekanto (2002:221) mengemukakan kalau teori peran (*role theory*) merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan sesuatu posisi tertentu. Peran yang berbeda menciptakan tipe tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Peranan merupakan dinamisasi dari status maupun penggunaan dari pihak serta kewajiban alias disebut subyektif. Kedudukan dimaknai bagaikan tugas ataupun pemberian tugas kepada seorang maupun sekumpulan orang. Peran mempunyai aspek- aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi ataupun tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini ialah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.

- 3) Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku seseorang yang berarti untuk struktur sosial masyarakat.

Bersumber pada penjelasan di atas sehingga bisa dinyatakan kalau peran ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dipunyai oleh orang yang berkedudukan di publik. Seorang yang memiliki peran tertentu bisa dikatakan bagaikan pemegang kedudukan. Sesuatu hak sesungguhnya ialah wewenang untuk berbuat ataupun tidak berbuat, sebaliknya kewajiban merupakan beban ataupun tugas. Kedudukan dalam sesuatu lembaga berkaitan dengan tugas serta peranan, yakni dua perihal yang tidak bisa dipisahkan dalam penerapan pekerjaan oleh seorang ataupun lembaga. Tugas ialah seperangkat bidang pekerjaan yang wajib dikerjakan serta menempel pada seorang ataupun lembaga cocok dengan guna yang dimilikinya.

Kesejahteraan sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

2.2 Pengertian kebijakan

Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik di dalam usaha memilih tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Miriam Budiardjo kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Budiardjo, 1971)

2.2.1 kebijakan sosial

Mohd Yusri dan Syaiful Syafri. menerjemahkan kebijakan sosial itu dengan kebijakan bidang sosial karena dalam administrasi pemerintahan cukup banyak kebijakan, ada yang berhubungan dengan kebijakan bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang bencana alam atau non-alam, dan sebagainya.

Kebijakan bidang sosial umumnya berhubungan dengan mereka-mereka (masyarakat) yang tidak mampu melaksanakan fungsi sosial. Misalnya karena kemiskinan, keterlantaran (anak, lansia), keterpencilan (terasing), disabilitas, pengangguran, dan sebagainya. Disinilah diperlukan kebijakan bidang sosial agar masyarakat tersebut dapat diberdayakan untuk mampu melaksanakan fungsi sosial atau masyarakat memerlukan perlindungan dan jaminan sosial atau rehabilitasi sosial sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya

2.2.2 aspek aspek kebijakan sosial

Mohd Yusri dan Syaiful Syaifri. membagi aspek-aspek kebijakan sosial ini dalam empat bagian, yaitu :

1. Kebijakan sebagai suatu proses (*Policy as a process*).
2. Kebijakan sebagai produk (*policy as a product*)
3. Kebijakan sebagai penguasa regulasi (*policy as a rulers of a regulation*)
4. Kebijakan sebagai perencanaan redistribusi sosial (*policy as a planning for sosial redistribution*)

2.2.3 tujuan kebijakan sosial

Jika kita mendalami kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, kita akan menyadari dari hari, minggu, bulan, dan tahun kehidupan manusia terjadi perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi erat kaitannya dengan proses pembangunan yang menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Karenanya dalam proses pembangunan, tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya

manusia dengan teknologi yang secara terus-menerus terjadi peningkatan sehingga potensi sumber daya alam ikut menjadi solusi sejarah untuk dirambah, sebagai sumber pendapatan asli daerah atau sebagai sasaran para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemajuan sumber daya manusia, umumnya mengikuti peningkatan pendapatan pemilik sumber daya manusia itu karena lapangan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki membuka peluang kerja dengan gaji yang menantang.

2.3 Pengertian perencanaan

Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan (planning) dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya.

Sederhananya, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ini dapat membantu kita memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi,

membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Erly Suandy (2001:2), pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Menurut Becker (dalam Rustiadi 2008:339), pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan.

Menurut Alder (dalam Rustiadi 2008:339), pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Menurut Douglas, definisi perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya.

Menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana terperinci untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru.

2.3.1 Karakteristik perencanaan

1. Fungsi Manajerial

Perencanaan adalah fungsi manajerial pertama dan terpenting menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yaitu pengorganisasian,

kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian, karena dilakukan di dalam lingkup rencana yang dibuat.

2. Berorientasi Pada Tujuan

Perencanaan berfokus pada mendefinisikan tujuan organisasi, mengidentifikasi tindakan alternatif, dan memutuskan rencana tindakan yang tepat, yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Proses Berkelanjutan

Rencana dibuat untuk jangka waktu tertentu, katakanlah untuk satu bulan, kuartal, tahun, dan seterusnya. Setelah periode tersebut berakhir, rencana baru dibuat, dengan mempertimbangkan persyaratan dan kondisi organisasi saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan adalah proses yang berkelanjutan, karena rencana dibingkai, dijalankan, dan diikuti oleh rencana lain.

4. Proses Intelektual

Perencanaan merupakan proses latihan mental yang melibatkan penerapan logika, berpikir, memperkirakan, membayangkan secara cerdas dan berinovasi, dll.

5. Futuristik

Dalam proses perencanaan, kita dapat 'mengintip' masa depan. Ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisis dan memprediksinya sehingga organisasi dapat menghadapi tantangan masa depan secara efektif.

6. Pengambilan Keputusan

Keputusan dibuat mengenai pilihan tindakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Alternatif yang dipilih harus yang terbaik di

antara semua pilihan, yang memiliki paling banyak kelebihan dan sedikit kekurangan.

2.3.2 Fungsi perencanaan

Pada dasarnya fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan seorang manajer harus menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yaitu:

- What: Apa tujuan yang ingin dicapai organisasi?
- Why: Mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi?
- Where: Dimana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut?
- When: Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai (berhubungan dengan jadwal)?
- Who: Siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi?
- How: Bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi?

Intinya, perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik.

2.3.3 Tujuan perencanaan

Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan tentu saja perencanaan yang dibuat akan berbeda-beda. Namun, pada dasarnya tujuan organisasi melakukan perencanaan adalah beberapa berikut ini:

- Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi.
- Memberikan arahan (direction) kepada para administrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana.
- Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.
- Menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol.

2.3.4 jenis-jenis perencanaan

Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan jangka waktunya. Adapun penjelasan jenis-jenis perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Berdasarkan Ruang Lingkup

- Rencana strategis (strategic planning), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah.
- Rencana taktis (tactical planning), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama.

- Rencana terintegrasi (integrated planning), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu.

2. Perencanaan Berdasarkan Tingkatan

- Rencana induk (master plan), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas.
- Rencana operasional (operational planning), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi.
- Rencana harian (day to day planning), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

3. Perencanaan Berdasarkan Jangka Waktu

- Rencana jangka panjang (long term planning), yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10 – 25 tahun.
- Rencana jangka menengah (medium range planning), yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5 – 7 tahun.
- Rencana jangka pendek (short range planning), yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun.

2.4 Kesejahteraan sosial

Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2010:3) adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

Adapun definisi kesejahteraan sosial yang lain menurut Suharto (2009: 154) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Berdasarkan definisi tersebut maka kesejahteraan sosial merupakan keadaan untuk memenuhi semua kebutuhan dari mulai material dan spiritual sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan layak tanpa adanya halangan apapun. Fungsi sosialnya tersebut dapat juga berupa sosialisasinya serta mobilitas dalam kesehariannya.

2.4.1 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai kehidupan yg sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.4.2 Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial

menurut Friedlander dan Apte, (1982) dalam Fahrudin, (2012: 12) adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Pencegahan (preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

b. Fungsi penyembuhan (curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan (development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalam pemecahan masalah penyandang disabilitas yang tidak dapat terlaksana kemandiriannya, upaya untuk memenuhi kemandirian penyandang disabilitas pihak lembaga yang terkait perlu untuk terlibat dalam memecahkan masalah tersebut.

2.5 Pengertian perencanaan sumber daya manusia (SDM)

Robert Mathis dan John Jackson (2001) menegaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses menganalisis dan mengidentifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia. Sedangkan sasaran perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan dan mempertahankan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan, mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul dari potensi kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia, menjadi dasar program penerimaan tenaga kerja dan rencana pengembangan.

James Stoner (2007) mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Werther and Davis (1996) menegaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah perkiraan sistematis dari organisasi untuk melihat masa depan tentang penawaran dan permintaan tenaga kerja dengan menentukan jumlah dan tipe tenaga kerja yang dibutuhkan, dimana bagian sumber daya manusia dapat merencanakan langkah-langkah penarikan, seleksi, perencanaan kader dan aktivitas sumber daya manusia lainnya.

Mangkunegara (2003) menyatakan perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi

dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis.

Andrew E Sikula (1981:145) mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Mondy dan Noe (1995) mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat, akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan.

2.6 pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Soerjono Soekanto (1982) kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Menurut Para Ahli

A. Kartasmita dalam Rahmawati (2006:4)

Mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurangkurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu :

1. Rendahnya Taraf Pendidikan
2. Rendahnya Derajat Kesehatan
3. Terbatasnya Lapangan Kerja
4. Kondisi Keterisolasian

B. Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) Mengemukakan

bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh :

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah
2. Malas Bekerja
3. Keterbatasan Sumber Alam

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

5. Keterbatasan Modal

6. Beban Keluarga

C. Nasikun dalam Suryawati (2005:5)

Menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. Pelestarian Proses Kemiskinan Proses pemiskinan yang dilestarikan.
2. Pola Produksi Kolonial Negara
3. Manajemen sumber daya Alam dan Lingkungan.
4. Kemiskinan terjadi karena siklus alam.
5. Peminggiran kaum perempuan dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
6. Faktor budaya dan etnik.

D. Suryadiningrat dalam Dadan Hidayana (2009:30)

Mengernukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.

Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya :

1. Keengganan bekerja dan berusaha
2. Kebodohan

3. Motivasi rendah
 4. Tidak memiliki rencana jangka panjang
 5. Budaya kemiskinan
 6. Pemahaman keliru terhadap kemiskinan
2. Bentuk dan jenis kemiskinan

Menurut (Bagong Suryanto, 1996) jenis kemiskinan dibedakan dua kategori. Pertama, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan poporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Kedua, kemiskinan absolut yaitu suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, papan, pangan dan pendidikan.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

A. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

B. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

C. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen.

D. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004: 8-9). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1. Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur.

2. Kemiskinan Buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.

2.7 pengertian kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.

Menurut Abad Badruzaman (2009;284) kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mecolok. Atau dapat juga diartikan suatu keadaan dimana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin.

Menurut Soerjono Soekanto, kesenjangan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur- unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Sebagai teoritisi struktural fungsional, Emile Durkheim cenderung melihat ketimpangan sosial sebagai pembedaan fungsi dalam struktur sosial yang tak terhindarkan.

Max Weber, teoritisi tindakan sosial akan menilai ketimpangan sosial sebagai hasil dari perbedaan kepentingan masing-masing individu yang diekspresikan dalam sistem perilaku dan tindakan.

Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial

1. Perbedaan sumber Daya Alam

Sumber daya alam berhubungan erat dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Apabila dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, laju perekonomian suatu daerah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, tingkat perekonomian suatu daerah rendah apabila masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal.

2. Kebijakan Pemerintah

Terkadang kebijakan pemerintah dapat menyebabkan kesenjangan sosial. misalnya kebijakan tentang program transmigrasi. Ketika warga pendatang lebih cepat maju dibandingkan dengan warga asli, ketimpangan sosial dapat terjadi. Ketimpangan tersebut terjadi karena ada ketidaksetaraan antar dua kelompok yang seharusnya dapat berkembang bersama-sama.

3. Pengaruh Globalisasi

Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan mampu memanfaatkan globalisasi untuk mencapai kemajuan. Sementara itu, masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi secara tepat tidak akan mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi. bahkan mengalami ketertinggalan.

4. Faktor Demografis

Kondisi Demografis menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Perbedaan kondisi demografis suatu daerah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial karena perbedaan produktivitas kerja masyarakat pada setiap daerah.

5. Letak dan Kondisi Geografis

Letak dan kondisi geografis Indonesia mempengaruhi tingkat pembangunan suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah umumnya lebih mudah membangun berbagai infrastruktur, sementara masyarakat yang tinggal dataran tinggi membutuhkan waktu dan proses panjang dalam pembangunan karena terkendala kondisi alam yang menanjak dan tidak merata. Menurunnya pendapatan per kapita.

6. Kemiskinan

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi

7. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah (Moleong, 2007).

Sementara menurut Nawawi dan Martini dalam Sugiyono (2013) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Dimana penelitian ini dilakukan melihat bagaimana peranan bappeda aceh

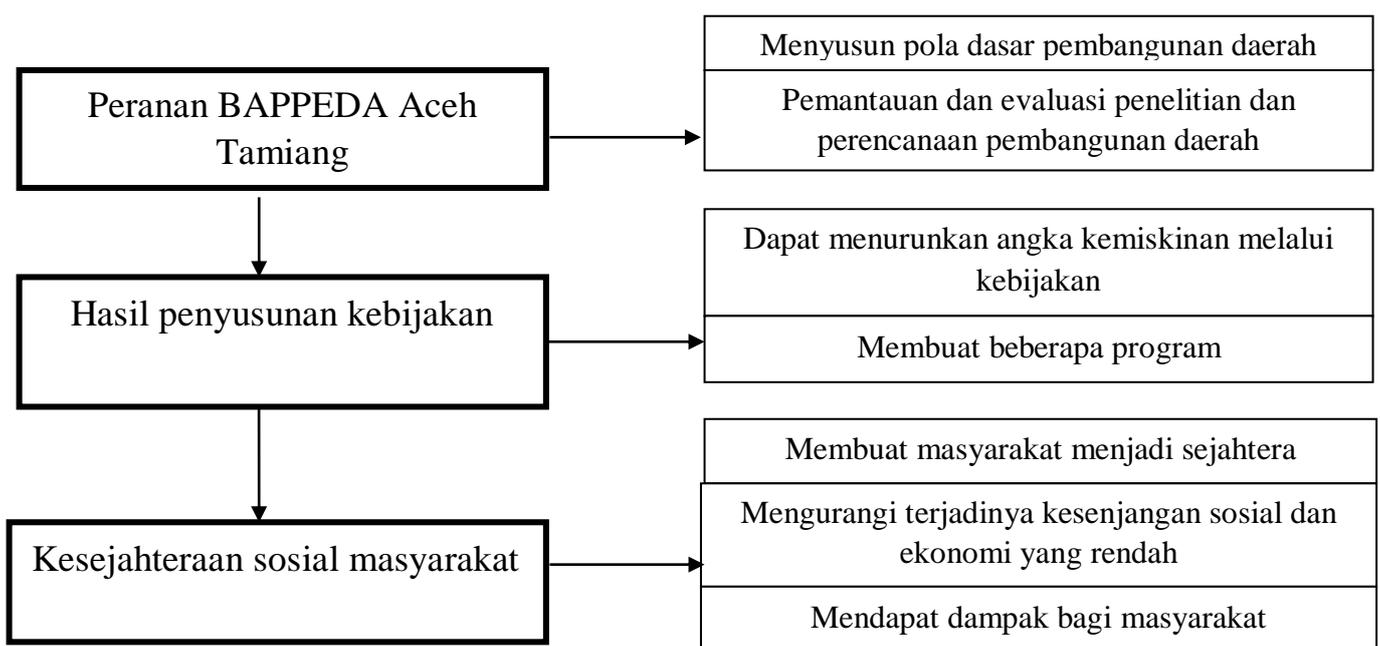
tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di kabupaten aceh tamiang

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data mengenai peranan bappeda aceh tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di kabupaten aceh tamiang. Menurut tujuan yang dipaparkan, maka jenis penelitian kualitatif deskriptif dapat dianggap sesuai dengan judul penelitian ini.

3.2. Kerangka Konsep

Berdasarkan dari judul penelitian, maka peranan bappeda aceh tamiang dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di kabupaten aceh tamiang, merupakan yang akan dideskripsikan dan dijelaskan, dimana dalam hal ini dilakukan berdasarkan:

Gambar 1.1. Kerangka Konsep



3.3. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Peranan mempunyai arti seperangkat tingkah yang diharapkan dipunyai oleh orang yang berkedudukan di publik. Seorang yang memiliki peran tertentu bisa dikatakan bagaikan pemegang kedudukan.
- b. Kebijakan adalah suatu pedoman atau petunjuk pelaksana yang baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- c. Perencanaan merupakan suatu proses yang menentukan sasaran yang ingin di capai, tindakan yang seharusnya di laksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai dan sdm yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
- d. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

- e. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
- f. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.
- g. Kesenjangan sosial adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, yang mana di sana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2. Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1	Peranan BAPPEDA Aceh Tamiang	<ul style="list-style-type: none"> - Peranan bappeda - Perencanaan yg matang - Efektifnya kebijakan /program
2	Kesejahteraan sosial Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - kemiskinan - kesejahteraan sosial - terjadinya kesenjangan - Ekonomi yang rendah - Dampak bagi masyarakat

Sumber: BAPPEDA Aceh Tamiang

3.5. Narasumber

Narasumber atau informan merupakan orang atau lembaga yang dijadikan sebagai sasaran dalam pengumpulan informasi yang mengetahui secara jelas tentang kondisi atau keadaan masalah yang sedang diteliti. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *Purpoise Sampling*, yaitu melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Pertimbangan yang dimaksud adalah hanya mengambil sampel yang dapat langsung menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, Informan utama dalam penelitian ini yaitu upt BAPPEDA dalam bidang perencanaan kesejahteraan sosial

Adapaun Narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

- b. Kasubbid kesejahteraan sosial
- c. Pegawai seksi kesejahteraan sosial
- d. staf bidang kesejahteraan sosial
- e. staf bidang pembangunan manusia
- f. Masyarakat yang mendapatkan dampak program

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Bila di lihat dari sumber datanya maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, meliputi wawancara dan dokumentasi. Data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti buku, surat kabar, majalah dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :

a. Observasi

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif merupakan observasi yang dimana pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang

berlangsung, sementara dalam observasi non partisipatif yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan (Sukmadinata, 2007). Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif karena mengingat efisiensi waktu dan kemampuan serta pengalaman yang kurang siap.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang diwawancara/ narasumber dan pewawancara/ peneliti untuk mendapat pemahaman akan pandangan seseorang (makna subjektif) terkait dengan hal atau kegiatan tertentu (Suharsaputra, 2012). Dengan kata lain, Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi dimana sang pewawancara/peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai (informan).

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. (Burhan, 2013).

3.7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data secara keseluruhan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dikutip dari Matthew B. Milles dan Michael Huberman (1992:16-21) mengenai analisis kualitatif terdiri dari tiga jalur yang selalu bersamaan yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara dilakukan peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu : deskripsi dan refleksi.

Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami yang berisi tentang apa yang dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapatan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang di jumpai.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pada pola dengan membuat

traskip penelitian, tujuannya untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik kesimpulan yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dirangkum atau dipilih hal-hal yang pokok. Data yang telah di reduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, sajian dapat diwujudkan dalam bentuk matriks, jaringan, atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan

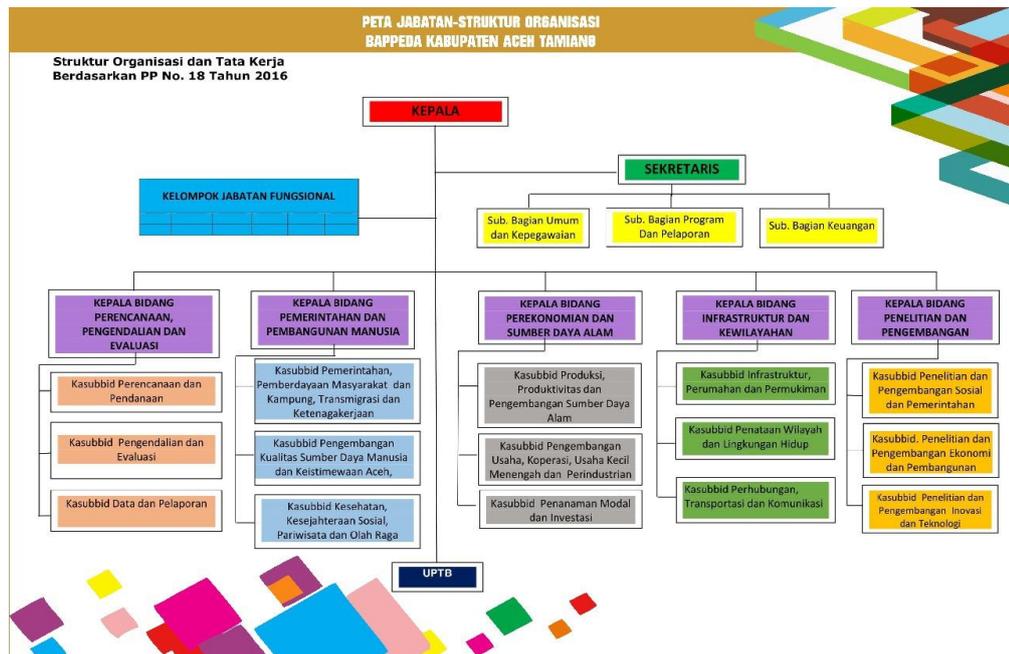
Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan cara mendiskusikannya. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang dan di BAPPEDA

Aceh Tamiang. Waktu yang di perlukan peneliti untuk penelitian ini sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan April 2021. Meliputi studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data sampai penyusunan laporan.

Struktur organisasi BAPPEDA Aceh Tamiang



Tugas dan fungsi Bappedda Kabupaten Aceh Tamiang

Fungsi Bappedda Kabupaten Aceh Tamiang

1. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
3. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta

infrastruktur dan kewilayahan;

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK);
5. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
6. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
7. Penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
8. Penyelenggaraan koordinasi dengan pihak lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
9. Pembinaan unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Badan

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2. Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
- Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK);
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja aceh (APBA), anggaran pendapatan belanja negara (APBN), bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- Pembinaan unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional

sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat

1. Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
 - Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
 - Pelaksanaan penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya dilingkungan dinas; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, pengendalian dan evaluasi serta data dan pelaporan pembangunan daerah.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - Penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, pengendalian dan evaluasi serta data dan pelaporan pembangunan daerah;
 - Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan serta perencanaan dan

pendanaan pembangunan daerah;

- Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- Pelaksanaan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang data dan pelaporan pembangunan daerah.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur pelaksana teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - Penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan

ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;

- Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan RENSTRA dan RENJA perangkat daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- Pelaksanaan koordinasi Musrenbang di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
- Pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;

- Pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
 - Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
- Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan.
 - Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh.

- Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana teknis perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi.
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - Penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
 - Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan RENSTRA dan RENJA perangkat

daerah di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;

- Pelaksanaan koordinasi Musrenbang di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
 - Pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
 - Pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi;
 - Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian serta penanaman modal dan investasi; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
- Sub Bidang Produksi, Produktivitas dan Pengembangan Sumber Daya

Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang produksi, produktivitas dan pengembangan sumber daya lam.

- Sub Bidang Pengembangan Usaha, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian.
- Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan investasi.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana teknis perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi.
3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - Penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan

- lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
- Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan RENSTRA dan RENJA perangkat daerah di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
 - Pelaksanaan koordinasi Musrenbang di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
 - Pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
 - Pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi;
 - Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman, penataan wilayah dan lingkungan hidup serta perhubungan, transportasi dan komunikasi; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
- Sub Bidang Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur, perumahan dan permukiman.
 - Sub Bidang Penataan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang penataan wilayah dan lingkungan hidup.
 - Sub Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, transportasi dan komunikasi.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan, 213 desa dan dengan Luas wilayah 1.956.72 km². Dengan ibukotanya Karang Baru yang terletak di Kecamatan Karang Baru. Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 287.733 jiwa. Tempat yang menjadi Tempat Penelitian lebih khususnya adalah di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang ini memiliki pekerjaan sebagai Pns, petani, Buruh, dan Wiraswasta. Dan juga penelitian ini dilakukan pada Instansi BAPPEDA Kabupaten Aceh

Tamiang yang berlokasi di Gampong Bundar, Karang Baru, Kabupaten Aceh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di BAPPEDA Aceh Tamiang untuk mengetahui bagaimana peranan BAPPEDA dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial, bab ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4.1.1 Peranan BAPPEDA dalam menyusun pola dasar pembangunan daerah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Development Planning Agency at Sub-National Level adalah unsur pendukung pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Bappeda berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 27 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP

RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bappeda merupakan lembaga non departemen yang langsung di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, Bappeda merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Ibaratnya Bappeda ini merupakan sebuah ruang untuk mendulang partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bappeda Kabupaten/Kota menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi.

Salah satu tolak ukur keberhasilan peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

Eksistensi Bappeda Kabupaten/Kota dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam menyusun pola dasar BAPPEDA Aceh Tamiang melakukan 4 tahapan yaitu:

1. Proses perencanaan perumusan

Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musrenbang. Musrenbang yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa di singkat RKPD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk RKPD, dilakukanlah penyerapan dan penjaringan aspirasi berupa forum

Musrenbang. Sebelum pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RKPD, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.

2. Proses pengorganisasian

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting dan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran dan saling tumpang tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan- pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Hal itulah yang mengharuskan Bappeda sebagai coordinator dalam proses perencanaan pembangunan hendaknya mempunyai langkah-langkah dalam mengaktualkan konsep koordinasi sebagai dilapangan sebagai upaya dalam mendesain pembangunan yang terarah yang secara konstitusional peran BAPPEDA dalam mengkoordinasikan pembangunan daerah tertuang dalam keputusan presiden republic indonesia nomor 27 tahun 1980 tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah pasal 4 ayat (2) tentang menyebutkan

bahwa: dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BAPPEDA tingkat I dan BAPPEDA tingkat II mengkoordinasikan aspek aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya

3. Proses pelaksanaan

BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

- a. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
- b. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
- c. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
- d. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.
- e. Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”; Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21;

- f. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
- g. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
- h. Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
- i. Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA- SKPD”;
- j. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
- k. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
- l. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
- m. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

Dalam proses pelaksanaan hal penting yang juga perlu diperhatikan yaitu:

- Ikhtisar eksekutif. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Bagian ini juga menyebutkan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan

terjadi pada tahun mendatang. LAKIN BAPPEDA tahun 2021 menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ikhtisar eksekutif BAPPEDA sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu format penyusunan LAKIN menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003.

- **Pendahuluan.** Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi). LAKIN BAPPEDA tahun 2021 menguraikan mengenai hal-hal umum tentang instansi berupa sejarah BAPPEDA, visi dan misi BAPPEDA, struktur organisasi BAPPEDA dan tujuan, pokok serta fungsi BAPPEDA. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan pendahuluan telah sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003.
- **Penutup.** Bagian ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAKIN BAPPEDA menguraikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja BAPPEDA dan mencantumkan 5 upaya pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan penutup telah sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003.

4. Proses pemantauan dan evaluasi perencanaan

Proses Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara terjadwal. Monitoring dan Evaluasi BAPPEDA dilakukan oleh kepala sesi, proses monitoring ini dilakukan minimal satu tahun dua kali monitoring, pada monitoring pertama kepala sesi melihat proses kegiatan pembangunan dan perkembangan melalui instansi terkait dan pada monitoring kedua kepala sesi melihat hasil kegiatan pembangunan dan berapa persen keberhasilan program. Kepala sesi melakukan monitoring dan evaluasi tersebut antara lain untuk memberikan motivasi kepada instansi terkait kegiatan pembangunan dan untuk mengetahui presentase kegiatan yang sudah dilaksanakan. Hal hal yang di monev BAPPEDA yaitu perkembangan kebijakan yang telah diberikan kepada masyarakat melalui instansi terkait. Hasil monev akan digunakan BAPPEDA sebagai tolak ukur untuk menyusun rencana tindak lanjut yang akan dikembangkan lagi di program yang akan mendatang.

4. 1.2 Perencanaan yang matang

Dalam kaitan ini penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis sehingga perlu dilakukan secara sistematis terarah, terpadu dan menyeluruh melalui kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang baik di level lokal, regional, nasional maupun global,

Metode kerja yang digunakan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ini bersifat partisipatif, transparan dan akuntabel serta sistematis.

Sebagai perencanaan BAPPEDA melakukan koordinasi agar upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik rencana maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi, dan antara lain instansi dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang efektif dan efisien. Dari hasil koordinasi dan hubungan kerja tersebut, dapatlah diketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan daerah, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil.

Tahapan selanjutnya dalam perumusan menyelenggarakan Musrenbangda, adapun tujuan Musrenbangda adalah Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya dan menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

4.2 PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi pembahasan yaitu tentang peran badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Aceh Tamiang dalam penyusunan

kebijakan dan bahan perumusan kesejahteraan sosial di kabupaten aceh tamiang.

4.2.1 Efektifnya kebijakan BAPPEDA dalam kesejahteraan sosial dan menurunkan angka kemiskinan

BAPPEDA Aceh Tamiang terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya adalah dengan cara mengoptimalkan hilirisasi program pembangunan dan produksi, sehingga nilai tambah produksi bisa dipertahankan serta memberi dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Program menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran ini menjadi prioritas Rencana pembangunan Jangka Menengah Aceh Tamiang (RPJM). Demikian disampaikan oleh ibu Irma selaku kasubbid kesejahteraan sosial, saat berbicara dalam Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Awal RKPA Tahun 2021. yang perlu disampaikan saat ini adalah beberapa parameter. Misalnya perkembangan ekonomi Aceh Tamiang sudah terus membaik dan ini merupakan pencapaian hasil yang baik.

Meski angka pengangguran dan kemiskinan digolongkan masih tinggi, namun ada penurunan di sana. “Ini harus diakui sebagai sebuah usaha yang tinggi, dari sebelumnya Aceh Tamiang pernah punya angka kemiskinan mencapai 20 persen, kini sudah turun di angka 15 persen. Bukan hal mudah mencapai angka ini dan tentunya perlu kerja sama yang baik.

Untuk terus bisa menurunkan angka kemiskinan, saya pikir sistem hilirisasi mutlak harus dilakukan. Sehingga nilai tambah produksi bisa dipertahankan dan ini akan memperbaiki sistem penurunan angka kemiskinan kita, dimana dengan produksi yang baik bisa memberi pendapatan yang baik kepada warga,” katanya.

Menurunkan angka kemiskinan memang bukan persoalan sederhana. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi, perlu mendapat perhatian, guna mengoptimalkan hasil pembangunan di Aceh Tamiang.

Bagian dari hilirisasi itu di antaranya adalah partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan stakeholder penting, pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Adapun 6 prioritas pembangunan Aceh tahun 2021 yaitu, hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing produk/jasa unggulan, pembangunan infrastruktur terintegrasi, peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan resiko bencana, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian, penguatan penerapan Dinul Islam dan budaya Aceh Tamiang.

Oleh karena itu, penyusunan RKPA 2021 harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif. Sehingga perlu juga memperhatikan aspek pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Ibu Irma mengatakan, untuk mewujudkan penyusunan RKPA yang berkualitas, maka penyusunan RKPA 2021 menggunakan pendekatan pembangunan secara holistik, tematik, integratif dan spasial. Selain itu, agar kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak didasarkan pada pendekatan money follow function, tetapi money follow program yang harus dilaksanakan secara multi sektor.

Ada beberapa program hilirisasi yang dirancang bappeda yaitu:

- **Komoditas Pertanian**

Marthunis menjabarkan, untuk peningkatan produksi komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan berbasis skala ekonomi, maka perlu menjaga kestabilan produksi komoditas tanaman pangan seperti padi dan lain-lain. Selanjutnya, kestabilan produksi hasil perkebunan seperti, karet, coklat, kelapa, kelapa sawit dan lain-lain. Kemudian kestabilan produksi daging baik ayam maupun sapi.

“Kita juga harus meningkatkan produksi telur dalam daerah untuk mengurangi ketergantungan dengan provinsi tetangga. Hasil tangkapan ikan perlu juga kita tingkatkan karena beberapa jenis komoditas ikan Aceh Tamiang adalah berpotensi pasar ekspor keluar daerah, ujarnya.

Selain itu, Aceh Tamiang juga perlu meningkatkan produksi hortikultura seperti Jagung, padi, dan cabe merah yang merupakan penyumbang inflasi. “Kemudian beberapa hasil hutan nonkayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti rotan, jernang, dan sebagainya,

juga perlu kita jaga kestabilan harga dan kita tingkatkan produksinya,” papar Marthunis.

- **Produksi industry**

Sementara untuk peningkatan produksi industri pengolahan, industri pangan yang ada sekarang harus digenjot produsinya. Kemudian memperkuat industri hulu agro.

“Kita sudah punya kawasan industri yaitu Kawasan Industri Perikanan di desa sruway. Namun perlu mempersiapkan lagi beberapa kawasan industri baru, seperti di daerah barat Aceh Tamiang. Nah tentu ini perlu perencanaan yang matang dan jangka panjang,” ujar Marthunis.

- **Keahlian tenaga kerja**

Pada sisi peningkatan keahlian tenaga kerja, hal yang perlu dilakukan antara lain, mengawal dan mempersiapkan kecakapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha maupun dunia industri. “Berbagai pelatihan yang berbentuk vokasional perlu kita tingkatkan, melakukan pembenahan sistem pelatihan yang berbasis sertifikasi kompetensi dan peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan menggalakkan keterampilan wirausaha produktif,” urai Marthunis.

- **Koperasi, UKM, dan BUMG**

Di sektor penguatan koperasi dan ukm serta bumg, perlu ditingkatkan daya saing UKM yang ada di Aceh Tamiang atau UKM naik kelas. Seluruh instrument UKM naik kelas, perlu dirancang dan diimplementasikan secara matang dan terukur oleh SKPA teknis.

“Kita perlu juga mengawal peran koperasi dalam melaksanakan misinya, yaitu mengelola berbagai macam produk unggulan lokal. Koperasi di Aceh harus aktif, mandiri, dan tangguh. Kemudian Aceh Tamiang punya ratusan BUMG yang tersebar disebar di seluruh desa atau gampong di Aceh tamiang. Nah itu juga perlu diberdayakan dalam rangka mengelola sumberdaya yang ada di gampong tersebut, menjadi produktif dan bernilai ekonomis,” papar Marthunis.

- **Perluasan Pangsa Ekspor**

Kemudian yang terakhir adalah peningkatan dan perluasan pangsa ekspor. Marthunis mengatakan, ini adalah pekerjaan-pekerjaan hilir yang harus ditingkatkan kinerjanya.

Ia memberi contoh, Aceh harus menjamin bahwa produk-produk UKM/IKM lokal mempunyai mutu pada pasar ekspor. “Untuk itu tentu perlu difasilitasi pelaku-pelaku usaha ekspor yang sudah ada dan terus memperbanyak pelaku usaha ekspor lainnya. Pemerintah juga harus jeli mendapatkan informasi pasar komoditas yang dibutuhkan suatu daerah/negara, sehingga pasar ekspor kita bisa meluas,” ujarnya.

Marthunis berpendapat, rangkaian THIS ini mutlak harus diterapkan jika ingin Aceh ini lebih baik pada tahun 2021. Dalam kaitan itu, Bappeda terus melakukan pengawalan terhadap skema yang sudah dirancang dan menjadi fokus pembangunan ekonomi di tahun 2021.

4.2.2 Kemiskinan yang semakin berkurang

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, menyatakan angka kemiskinan di wilayah kota paling timur Aceh itu terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, dan bahkan kini telah turun menjadi 14,94 persen (BPS Aceh tamiang 2021). Diharapkan penurunan bisa terus terjadi di masa mendatang.

"Angka kemiskinan di Aceh Tamiang sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan," kata Kepala Bappeda Aceh Tamiang, terkait percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh Tamang, dilansir dari Antara, Sabtu, 4 September 2021, meski angka kemiskinan mengalami penurunan, namun masih diperlukan strategi dan langkah percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh Tamiang agar lebih signifikan lagi kedepannya.

Untuk mencapai hasil tersebut, ada beberapa strategi penanggulangan yang kami lakukan, di antaranya mengurangi beban masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi biaya transaksi ekonomi, meningkat kualitas SDM, menjaga stabilitas pangan, dan mengatasi dampak bencana

Ia menjelaskan sejauh ini Pemkot Aceh Tamiang telah mengalokasikan anggaran yang menyentuh langsung terhadap masyarakat, seperti program mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dana pendidikan dari tingkat dasar, menengah serta perguruan tinggi.

Selain itu, dia melanjutkan, Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk biaya penyediaan pola ketersediaan gizi layanan kesehatan bagi anak umur 0-6 tahun melalui program Gerakan untuk Anak Sehat (Geunaseh), biaya beban

rekening listrik dan gas elpiji bagi masyarakat kurang mampu, serta bantuan sosial lainnya.

Untuk program peningkatan pendapatan masyarakat dan stabilitas pangan, Pemkot juga telah menggarap lahan pertanian yang terlantar untuk pengembangan produksi cabai merah, padi gogo, jagung, ketela, dan komoditi perkebunan lainnya. Dan juga bantuan pemberdayaan masyarakat baik di bidang pertanian dan perikanan serta perdagangan dan UKM.

4.2.3 Membuat masyarakat menjadi sejahtera di Aceh Tamiang

Kesejahteraan sosial di Aceh Tamiang sudah dapat dikatakan baik dikarenakan angka kemiskinan yang semakin terus menurun di tiap tahunnya yaitu dari angka kemiskinan 20% menjadi 15% (BPS Aceh Tamiang 2021).

Pendidikan di Aceh Tamiang juga dikatakan sudah cukup baik dikarenakan setiap anak sudah mendapatkan pendidikan sekolah di umur 6 tahun dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum pemerintah juga telah melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang merupakan kelanjutan dari Program Wajib Belajar 6 Tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

Dalam bidang kesehatan pemerintah juga ikut membantu masyarakat dalam programnya yaitu memberikan imunisasi sejak dini kepada balita, imunisasi dan

perbaikan gizi gratis pada balita diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memberikan gizi pada anaknya

4.2.4 Mengurangi terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang rendah melalui sumber daya Manusia (SDM) untuk mengatasi kesenjangan

BAPPEDA Aceh Tamiang terus memperkuat beberapa target pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya adalah dengan meningkatkan Kualitas Pendidikan, meningkatkan Pendidikan Vokasional, meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Hal ini disampaikan oleh pak Taufik selaku staf Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan SDM Bappeda Aceh Tamiang dalam konsultasi Ranwal RKPA 2021.

Dalam pemaparannya, Taufik menekankan bahwa Pengembangan Sumberdaya Manusia menjadi Prioritas Pembangunan pada tahun 2021. “Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Aceh akan melaksanakan beberapa program penunjang seperti Program Pendidikan lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi peserta pelaksanaan kegiatan profesi guru, dan mengirim guru-guru magang ke dalam maupun ke luar negeri.

Disamping itu, sambung Taufik, BAPPEDA Aceh juga akan meningkatkan pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan cara Uji Fit and Proper Test dan juga meningkatkan penyelenggaraan Akreditasi Sekolah, serta penyediaan beasiswa-beasiswa seperti mendukung meningkatkan beasiswa yatim, piatu dan piatu, beasiswa anak-anak berprestasi, beasiswa bagi

pendidik, beasiswa bagi santri berprestasi, beasiswa bagi masyarakat Aceh Tamiang, beasiswa bagi aparat, dan juga penguatan bahasa asing.

Pak Taufik juga menegaskan bahwa, pembangunan SDM tidak akan berjalan baik tanpa didukung dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Untuk itu, BAPPEDA Aceh Tamiang pada tahun 2021 akan mendorong peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti, melakukan evaluasi dan meningkatkan pemberian Jaminan Kesehatan Aceh yang terukur dan tepat sasaran, meningkatkan kualitas SDM kesehatan dan juga mutu farmasi serta alat kesehatan yang memadahi.

Akses dan mutu juga menjadi prioritas. Selain itu, BAPPEDA juga akan meningkatkan kesehatan keluarga, mengendalikan penyakit menular, penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan bersalin, pemenuhan imunisasi dasar, dan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum. Promosi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat juga ditingkatkan, serta penanggulangan masalah gizi (Stunting), dan juga pemberian makanan tambahan atau suplementasi gizi,” urai Taufik dalam pemaparannya.

Program prioritas lainnya, adalah meningkatkan Kesejahteraan Sosial seperti pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan memberikan pelatihan wirausaha bagi rumah tangga miskin, rehabilitasi sosial RTLH, Pemberian bantuan modal usaha dan alat bantu bagi Penyandang Cacat, Pemberian bantuan subsidi permakanan bagi anak dalam panti, Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia, dan penanganan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, sambung Taufik, juga menjadi fokus BAPPEDA Aceh Tamiang pada tahun 2021 seperti penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Pembinaan kota layak anak, Pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan (PUHA) serta Pemberdayaan masyarakat dan gampong yang meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Peningkatan Kapasitas Perangkat Mukim dan Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS). “Kita optimis dengan target-target peningkatan Sumberdaya Manusia yang kita rencanakan,”kata Taufik.

4.2.5 Ekonomi yang rendah

permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program perekonomian dan ketenagakerjaan yaitu kurangnya efektivitas pelaksanaan kegiatan yang disebabkan keterbatasan kapasitas aparat pembina, dan kurang sinergi antar pemangku kepentingan terutama mengingat keragaman sektor dan lokasi usaha koperasi dan UMKM, Kurangnya kesempatan usaha, keterbatasan akses kepada sumber daya produktif, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga menyebabkan perkembangan sektor ekonomi produktif belum mampu mendorong peningkatan pendapatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi daerah, Masih tingginya angka pengangguran, Masih kurangnya kualitas tenaga kerja serta keterlibatan tenaga kerja perempuan.

4.2.6 Dampak bagi masyarakat

Dampak peranan bappeda bagi masyarakat sangat berpengaruh besar yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, menurunkan kemiskinan, memperkuat

ekonomi masyarakat aceh tamiang, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pengelolaan usaha untuk masyarakat sehingga mencapai visi dan misi bappeda Aceh Tamiang

Adapun dampak lainnya yaitu:

- Mengusahakan program pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui distribusi sembako yang dibagikan secara gratis kepada penduduk miskin
- Menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dengan menyebarkan tenaga tenaga kesehatan ke desa dan pengadaan obat obatan melalui puskesmas
- Menyediakan kredit modal usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat miskin

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan diatas , Maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Peranan Bappeda dalam pembangunan Aceh Tamiang telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor No 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan kewenangan meliputi empat hal, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bappeda dalam penyusunan kebijakan dan bahan perumusan yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses monitoring.
3. Peranan BAPPEDA Aceh Tamiang sudah bisa dibilang cukup bagus dikarenakan sudah menurunkan angka kemiskinan Aceh Tamiang dari tahun ketahun dari 20 % sehingga menjadi 15%.

5.2 SARAN

1. Agar penerapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan demi

terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka BAPPEDA Aceh Tamiang dituntut untuk lebih serius dalam meningkatkan proses perencanaan dan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

2. Pemerintah harus melibatkan seluruh pelaku usaha dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai efektifnya perencanaan pembangunan di Aceh Tamiang, sehingga pola pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik di Aceh Tamiang
3. perlu kajian lebih lanjut tentang kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk perencanaan tahunan yang akan mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal. 2006. *kebijakan publik. suara bebas.* Jakarta.
- Alam S. 2014. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI.* Erlangga. Jakarta.
- Winters, Jeffry. 2018. "Demokrasi Indonesia di Bawah Kendali Oligarki". Diunggah dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/148526-demokrasi-indonesia-di-bawah-kendali-oligarki>, pada 1 November 2018
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. <https://acehtamiangkab.bps.go.id>. Aceh Tamiang.
- Bitar. 2021. *Kesenjangan Sosial : Pengertian, Contoh, Penyebab Dan Solusi.* <https://www.gurupendidikan.co.id/kesenjangan-sosial>.
- Donavon. 2004 . *kebijakan dan kebijakan publik.* gamedia. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* UGM Press. Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. 2007 : *kebijakan.* Rosdakarya. Bandung.
- Isbandi rukminto Andi,2013, *Kesejahteraan Sosial,* Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Prawiro, M. 2020. *Pengertian Perencanaan: Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenis Perencanaan.* Maxmanroe.com. jakarta.
- Prof. Dr. Wibowo, S.E., M.Phil. 2017. *manajemen sumber daya manusia.* CV. R.A.De.Rozarie. surabaya.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Rajawali Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Rajawali Press. jakarta
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung

- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, 1994, hlm. 572. By Ibnuismail|November 18th, 2020 accurate Jakarta Memahami Pengertian APBN dan APBD, serta Fungsi dan Tujuannya. Balai pustaka. Jakarta.
- Yusri, Moh. Syafri, Syaiful. 2021. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia*. Umsu Press. Medan





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umstu.ac.id Email : rektor@umstu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 10 Februari 2021

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : WAHYU RAMADHAN
N P M : 1703090009
Jurusan : Kesejahteraan Sosial
Tabungan sks : 127 sks, IP Kumulatif 3,51

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Peranan bappeda aceh tamiang dalam Penyusunan Kebijakan dan bahan Perumusan Kesejahteraan Sosial di kabupaten aceh tamiang	
2	Pelaksanaan Pengaturan kelembagaan bappeda aceh tamiang dalam Penanggulangan kemiskinan guna meningkatkan Kesejahteraan sosial	X
3	Evaluasi acuan terhadap Program Kesejahteraan Sosial rakyat aceh tamiang yg telah disusun Oleh bappeda aceh tamiang	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjudan.
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

PB : Yusri Iqpa.

Pemohon.

037

Medan, tgl. 10 Februari 2021

(WAHYU RAMADHAN)

Ketua

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 165/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **10 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **WAHYU RAMADHAN**
N P M : 1703090009
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN BAHAN PERUMUSAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Pembimbing : Dr. MOHD. YUSRI , M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 037.17.0309 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 10 Februari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 29 Djumadil Akhir 1442 H
11 Februari 2021 M

Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 01. MARET 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : WAHYU RAMADHAN
N P M : 17.03.09.0009
Jurusan : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. J.S./SK/IL.3/UMSU-03/F/20.21.. tanggal .. dengan judul sebagai berikut :

Peranan bappeda Aceh tamiang dalam Penyusunan kebijakan dan bahan Perumusan kesejahteraan sosial di kabupaten Aceh tamiang

PEMBIMBING : DR. MOHD. YUSRI, M.Si

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Menyetujui :

Pembimbing

(DR. MOHD. YUSRI, M.Si)

Pemohon,

Wahyu

(WAHYU RAMADHAN)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 295/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
 Hari, Tanggal : **Sabtu, 06 Maret 2021**
 Waktu : **10.00 WIB s.d. selesai**
 Tempat : **Online/Daring**
 Pemimpin Seminar : **H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ZAITUN ANADIA	1703090008	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI SERE WANGI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KERUKUNAN KUTAPANJANG KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES
2	MUHAMMAD REZEKI FIRMANSYAH SRG	1703090013	Dr. MOHD. YUSRIL, M.SI.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MERINGKANKAN PEREKONOMIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) SI KELURAHAN BINJAI SERBANGAN TAHUN 2021
3	WAHYU RAMADHAN	1703090009	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	Dr. MOHD. YUSRIL, M.SI.	PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN BAHAN PERUMUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
4	AGUS EFRILIAN MU'ARIF	1703090021	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. MOHD. YUSRIL, M.SI.	EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA PANTAI BALAI KAB. ACEH TAMIANG
5					

Medan, 21 Rajab 1442 H
06 Maret 2021 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP.



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : WAHYU RAMADHAN
NPM : 1703090009
Jurusan : KESEJAHTERAAN SOSIAL
Judul Skripsi : PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG dalam PENYUSUNAN KEBIJAKAN dan bahan PEMUSATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL di KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	18/02/2021	BIMBINGAN PENETAPAN JUDUL	A
2	20/02/2021	BIMBINGAN BAB 1 S/D III	A
3	22/02/2021	PERBAIKAN LATAR BELAKANG	A
4	24/02/2021	PERBAIKAN LATAR BELAKANG	A
5	27/02/2021	ACC PROPOSAL SEMPRO	A
6	11/03/2021	BIMBINGAN PANDUAN WAWANCARA	A
7	23/09/2021	BIMBINGAN BAB 4 DAN 5	A
8	25/09/2021	BIMBINGAN BAB 4 DAN 5	A
9	27/09/2021	BIMBINGAN BAB 5	A
10	29/09/2021	ACC SIDANG MEJA HIJAU	A

Medan, 7 OKTOBER 2021...

Dekan,

(Dr. AEFIN SALEH, S.Sos, M.Si)

Ketua Jurusan,

(MUHAMMAD, S.Sos, M.Si...)

Pembimbing,

(Dr. MOHD. YUSEI, M.Si...)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Slk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 1184/UND/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Jum'at, 15 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	KIKI ANDRIANI	1703090007	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 DI DESA PASAR LEMBU KAB. ASAHAN
2	SYAFRIADI	1703090011	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG TANGSUKH NUSANTARA COVID 19 DI DESA SUKA MAKMUR GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL
3	WAHYU RAMADHAN	1703090009	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si	PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN BAHAN PERUMUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Tanggal 3 mhs

13/10/2021

Medan, 06 Rabul Awwal 1443 H
13 Oktober 2021 M



Ditetapkan oleh :

Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH, M.Hum

Wakil Rektor I

Rektor

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.H.Kom



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 434/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 12 Syaban 1442 H
26 Maret 2021 M

Kepada Yth : **Bappaeda Aceh Tamiang**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **WAHYU RAMADHAN**
N P M : 1703090009
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN BAHAN PERUMUSAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476
e-mail : bappedatamiang@yahoo.com www.bappeda.acehtamiangkab.go.id

Karang Baru, 23 April 2021 M
11 Ramadhan 1442 H

Yang Terhormat :

Nomor : 800 / 1414 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin
Penelitian Mahasiswa

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 434/KET/II.3-AU/F/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang berjudul **Peranan Bappeda Aceh Tamiang Dalam Penyusunan Kebijakan Dan Bahan Perumusan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang**.
2. Kami memberi izin penelitian skripsi untuk mahasiswa yang bersangkutan :
Nama : Wahyu Ramadhan
NIM : 1703090009
Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terimakasih.

Kepala Bappeda
Kabupaten Aceh Tamiang,



Drs. Rianto Waris
Pembina Utama Muda
NIP. 19620323 198503 1 009

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tamiang sebagai Laporan.
2. Arsip

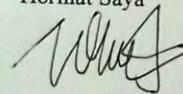
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Ramadhan
Tempat/Tanggal Lahir : Kualasimpang, 04 Januari 2000
Nomor Hp : 081269874738
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
E-mail : wahyuwaang397@gmail.com
Hobi : Futsal
Alamat : Kualasimpang, Aceh Tamiang, Aceh
Pendidikan formal :

1. Tahun 2005 – 2011 SD Negri 1 Kualasimpang
2. Tahun 2011 – 2014 SMP Negri 2 Kualasimpang
3. Tahun 2014 – 2017 SMA Negri 2 jurusan Muda

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya

Hormat Saya



Wahyu Ramadhan

PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN BAHAN PERUMUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Draft Wawancara (Instrumen Penelitian)

Peneliti memiliki peran sebagai instrument pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat Bantu. Perangkat Bantu yang digunakan adalah panduan wawancara (interview guide). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak BAPPEDA. Adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

Draft wawancara untuk kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

1. Apakah kebijakan/program kesejahteraan sosial yang dibentuk sudah sesuai harapan BAPPEDA ?
2. Jika belum, program seperti apa yang ingin diperbaiki ?
3. Apa saja kendala yang didapat dalam menyusun program kesejahteraan sosial ?
4. Bagaimana mekanisme yg seharusnya dilakukan agar efektifnya program program kesejahteraan sosial yang dirancang BAPPEDA ?
5. Apa saja bentuk program program yang telah dirancang BAPPEDA dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat ?
6. Apakah sudah matang perencanaan kesejahteraan social yang telah dirancang BAPPEDA ?
7. Bagaimanakah sistem perencanaan kesejahteraan social dilakukan ?

8. Siapa saja yang terlibat dalam membuat perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial ?
9. Apa saja indikator/tolak ukur BAPPEDA dalam menyusun perencanaan kesejahteraan sosial ?
10. Bagaimana sejauh ini hubungan kerja sama antara BAPPEDA dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat ?
11. Bagaimanakah solusi dalam menghadapi kendala kendala perencanaan kesejahteraan social masyarakat ?
12. Apa saja peranan BAPPEDA dalam menjalankan tugasnya ?
13. Apakah peranan BAPPEDA sudah sesuai harapan pemerintah daerah ?
14. Bagaimana partisipasi dinas/instansi terkait dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Aceh Tamiang ?
15. Bagaimana pelaksanaan perencanaan yang telah di rancang BAPPEDA ?
16. Menurut BAPPEDA Aceh Tamiang bagaimanakah kondisi kemiskinan di Aceh Tamiang ?
17. Apa saja yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kemiskinan masyarakat di Aceh Tamiang ?
18. Bagaimana peran perencanaan dalam menanggulangi kemiskinan ?
19. Apa yang menjadi penyebab kurangnya kesejahteraan pada masyarakat ?
20. Bagaimana cara kordinasi antara pihak BAPPEDA dan instansi sosial yang terkait ?

21. Apakah dengan adanya program dari BAPPEDA, kesejahteraan masyarakat miskin sudah membaik ?
22. Apakah ada kendala yang disebabkan oleh pendanaan ?
23. Apakah penerima bantuan sosial hanya masyarakat miskin saja?
24. Bagaimana cara BAPPEDA dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang rendah pada masyarakat ?
25. Sebutkan perencanaan apa saja yang telah dilakukan untuk masyarakat perekonomian rendah ?
26. Apakah bantuan sosial dapat mensejahterakan masyarakat ?
27. Apakah perencanaan yang dijalankan BAPPEDA sudah merata dan transparan ?

Draft wawancara untuk masyarakat penerima manfaat program bappeda

1. Apakah program program kesejahteraan sosial yang di terima sudah sesuai dengan masyarakat harapan?
2. Apakah perencanaan kebijakan berupa bantuan sosial sudah tepat sasaran?